

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, jumlah penduduk yang banyak, serta luas wilayah yang sangat besar. Tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.054.853 juta jiwa sedangkan luas wilayah Indonesia seluas 1.904.569 km.

Sumber daya alam serta manusia yang sangat banyak dan luas haruslah dikelola dengan sebaik-baiknya, karena apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah baru. Masalah baru tersebut adalah kesenjangan akan kebutuhan dengan sumber daya yang dimiliki atau dapat disebut dengan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dapat timbul dari tidak pandainya sumber daya manusia mengelola sumber daya alam. Hal tersebut menyebabkan sumber daya manusia kekurangan sumber daya alam yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Akibat dari tidak pandainya manusia mengelola sumber daya alam menyebabkan banyak sumber daya alam yang terbuang sia-sia. Kemiskinan merupakan masalah yang sudah lama ada di Indonesia. Perlahan-lahan permasalahan kemiskinan di Indonesia terus ditangani oleh pemerintah yang berkerjasama dengan masyarakat dan swasta. Salah satu bentuk penanganan kemiskinan di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat.

Dewasa ini, banyak sekali bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu caranya adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan kampung tematik. Konsep kampung tematik menurut Idziak, Majewski, & Zmyslony dalam (Tamara, 2018: 42) lebih pada menawarkan masyarakat untuk terlibat proaktif, sehingga tidak hanya berbasis masyarakat akan tetapi juga penciptaan ruang kampung berciri khas yang berkelanjutan oleh masyarakat. Pembangunan kampung tematik di Indonesia mulai gencar dilakukan beberapa tahun belakangan. Salah satu daerah yang gencar membangun kampung tematik adalah Semarang.

Kota Semarang tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan pemukiman yang belum tertata rapi. Penduduk miskin di Kota Semarang dalam enam tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan Kota Semarang pada tahun 2011 sebesar 5,68% yang merupakan tingkat kemiskinan tertinggi selama enam tahun terakhir, mengalami penurunan tajam pada tahun 2012 menjadi 5,13%, sedangkan pada tahun 2013 kembali meningkat sebesar 5,25% dan baru pada tahun 2014 selalu mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 4,85%. (RPJMD Kota Semarang 2016-2021)

Masalah kemiskinan di Semarang berdampak pada berbagai bidang, salah satunya adalah tata ruang. Kemiskinan identik dengan perumahan yang kumuh, karena masyarakat sulit memenuhi kebutuhan akan papan, sehingga kurang memperhatikan kelayakan rumah yang didirikannya. Bukan hanya rumah, tetapi juga lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka

Pemerintah Kota Semarang berusaha untuk mengatasinya. Salah satu bentuk usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pengadaan program pembangunan kampung tematik.

Kampung tematik Kota Semarang masuk dalam program Gerbang Hebat. Gerbang Hebat adalah singkatan dari **GER**akan **Bersama** Penanggul**AN**gan **KemiskinaN** dan Pen**G**angguan melalui **H**armonisasi **E**konomi, **E**dukasi dan **E**tos **BE**rsama Masyarak**AT**. Gerbang Hebat memiliki 2 filosofi, berikut adalah filosofi Gerbang Hebat :

1. Pintu masuk dalam suatu ruang lingkup untuk melakukan aktivitas dan sinergitas antara Pemerintah Kota dan masyarakat serta stakeholder yang didasari pada komitmen bersama, semangat yang tinggi, jujur dan ikhlas dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Semarang.
2. Hebat dalam komitmen, sinkronisasi, perencanaan, sinergitas pelaksanaan, serta pemberdayaan masyarakat yang inovatif dalam penanganan program kemiskinan dan pengangguran di Kota Semarang.

Gambar 1.1

Lambang Gerbang Hebat



Sumber : Pemerintah Kota Semarang (2018)

Tahun 2016 Semarang memiliki 32 kampung tematik, salah satunya adalah kampung tematik susu perah yang terletak di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik. Pelaksanaan kampung tematik sesuai dengan UU no 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/444 tanggal 24 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang.

Tabel 1.1

Daftar Kampung Tematik Kota Semarang

No	Kecamatan	Kelurahan Lokasi	Nama Tematik
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Semarang Tengah	Kel. Miroto	Miroto Paru-parune Kutho
		Kel. Kranggan	Kampung Lumpia
2	Semarang Utara	Kel. Kuningan	Kampung Sehat Ramah Anak
		Kel. Tanjung Mas	Kampung Hidroponik
3	Semarang Selatan	Kel. Lemper Tengah	Kampung Tempe Gumegeh
		Kel. Pleburan	Kampung Taman Jahe
4	Semarang Timur	Kel. Rejomulyo	Kampung Batik
		Kel. Mlatiharjo	Kampung Ciliwung Gumegeh
5	Semarang Barat	Kel. Krapyak	Kampung Agro
		Kel. Gisikdrono	Kampung Pelayanan

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Ngaliyan	Kel. Purwoyoso	Kampung Serasi Berimbang
		Kel. Bringin	Bringin Berseri
7	Tugu	Kel. Mangunharjo	Kampung Mangut
		Kel. Tugurejo	Kampung Keset Perca
8	Mijen	Kel. Mijen	Kampung Anggrek
		Kel. Wonolopo	Kampung Jamu
9	Genuk	Kel. Bangetayu Kulon	Kampung Jajan Pasar
		Kel. Bangetayu Wetan	Kampung Bebas Jentik
10	Pedurungan	Kel. Palebon	Kampung Seni
		Kel. Tlogomulyo	Kampung Sari Mulyo
11	Gayamsari	Kel. Gayamsari	Kampung Kreatif
		Kel. Tambakrejo	Kampung Sentra Bandeng
12	Tembalang	Kel. Tandang	Kampung Ramah Lingkungan
		Kel. Sandanguwo	Kampung Bunga Ronce
13	Banyumanik	Kel. Pudukpayung	Kampung Jajan Pasar
		Kel. Gedawang	Kampung Susu Perah
14	Gunungpati	Kel. Gunungpati	Kampung Alam Malon
		Kel. Sukorejo	Kampung Jawi
15	Gajahmungkur	Kel. Lemponsari	Kampung Beliksari
		Kel. Bedan Nduwur	Kampung Kansoli
16	Candisari	Kel. Karanganyar Gunung	Kampung Home Industry
		Kel. Wonoketingal	Kampung Organik

Sumber: Pemerintah Kota Semarang (2018)

Kampung tematik di Kelurahan Gedawang memiliki nama Kampung Susu Perah. Kampung Susu Perah diambil karena banyak warga Kelurahan Gedawang yang berprofesi sebagai peternak sapi di masing-masing rumahnya, tetapi karena perkembangan jaman dan jumlah penduduk yang terus bertambah, kandang-kandang sapi yang berada di setiap rumah peternak menjadi salah satu sumber

permasalahan. Permasalahannya adalah muncul aroma tidak sedap dari kandang sapi yang mengganggu rumah warga di sekitarnya. Berdasarkan masalah tersebut, dibentuklah Kampung Tematik Susu Perah yang menggunakan satu lahan kosong untuk menyatukan semua sapi-sapi dari peternak yang ada dan mengelolanya secara bersama-sama antar seluruh warga di Kelurahan Gedawang. Kelurahan Gedawang dipilih langsung oleh Wali kota Semarang untuk menjadi kampung tematik dengan potensinya berupa peternakan sapi.

Menurut Kristianto (2009:3) partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Definisi partisipasi menurut Kristianto tersebut belum sesuai dengan partisipasi yang terjadi di Kampung Tematik Susu Perah. Pengelolaan Kampung Tematik Susu Perah Gedawang membutuhkan kerja sama dengan seluruh warga, akan tetapi partisipasi warga belumlah maksimal. Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara antara penulis dengan Lurah Kelurahan Gedawang, Bapak Mulyantoro.

“ Permasalahan di Kampung Tematik Susu Perah itu belum ada reorganisasi mbak. Peternak sapi kebanyakan sudah sepuh, jadi cuma bisa caranya ngarit, perah susu, dan bersihin kandang saja. Keahlian lain seperti mengolah susu dan memasarkannya belum begitu bisa mbak. Karena itu dibutuhkan anak-anak muda dalam yang mengelola kampung tematik dari segi manajemennya, pengolahan susunya dan pemasaran produk “ (Wawancara 11 Oktober 2018)

Hal tersebut juga dibuktikan dengan kesenjangan antara jumlah penduduk usia produktif dan jumlah pengurus kampung tematik. Penduduk usia produktif

berjumlah 6222 orang, sedangkan pengurus kampung tematik hanya berjumlah 11 orang saja. Kesenjangan tersebut membuktikan keengganaan masyarakat untuk berpartisipasi.

Tabel 1.2
Data Warga Gedawang berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1.	0-14 tahun	2337
2.	15-64 tahun	6222
3.	>64 tahun	291

Sumber: Data Monografi Kelurahan Gedawang

Kesempatan yang belum dibuka secara luas oleh pemerintah Kelurahan Gedawang agar masyarakat Kelurahan Gedawang berpartisipasi dalam pengelolaan Kampung Tematik Susu Perah juga menjadi penyebab dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa selama ini yang ikut serta membangun Kampung Tematik Susu Perah hanya peternak sapi yang sekaligus berperan sebagai pengurus Kampung Tematik Susu Perah. Penejelasan tersebut menjadi bukti bahwa terdapat masalah dalam partisipasi pembangunan Kampung Tematik Susu Perah, baik dari segi masyarakat maupun pemerintahnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Tematik Susu Perah menjadi tidak maksimal.

Tabel 1.3
Pengrus Kampung Tematik Susu Perah

No	Nama Pengurus	Peran dalam Kepengurusan
1	Surani	Ketua
2	M. Isam	Pembantu Umum
3	Yuri	Sekretaris
4	Saifudin	Bendahara
5	Hamdi	Anggota
6	Jamari	Anggota
7	Sudrajat	Anggota
8	Wasimin	Anggota
9	Rasdi	Anggota
10	Solikan	Anggota
11	Ramelan	Anggota

Sumber : Wawancara Penulis

Masalah partisipasi dalam pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang menyebabkan banyak dampak. Beberapa dampak tersebut adalah tidak adanya regenerasi pada kepengurusan Kampung Tematik Susu Perah, membuat kepengurusan yang selama ini diisi oleh peternak dengan usia rata-rata diatas 50 tahun kesulitan dalam mengembangkan Kampung Tematik Susu Perah. Masalah lain yang timbul adalah tidak adanya sumber daya yang memiliki kemampuan selain mengurus sapi, sedangkan kemampuan selain mengurus sapi seperti mengembangkan olahan susu; manajemen keuangan; kemampuan hubungan dengan pihak lain sangat dibutuhkan dalam mengembangkan Kampung

Tematik Susu Perah menjadi lebih baik lagi. Kurangnya kemampuan dari peternak sapi yang sekaligus menjadi pengurus Kampung Tematik Susu Perah dibuktikan melalui kandang sapi yang juga sudah dibangun melalui bantuan dari Dinas Peternakan Kota Semarang justru diubah oleh peternak sapi dan menjadi kurang layak.

Gambar 1.2
Kondisi Kandang Sapi Kampung Tematik Susu Perah



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2018

Masalah-masalah yang timbul dari kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan Gedawang dalam pembangunan Kampung Tematik Susu Perah menjadi bukti bahwa partisipasi merupakan hal yang penting dalam sebuah program pembangunan. Pendapat lain yang mengemukakan pentingnya partisipasi dijelaskan oleh Conyers (dalam Ngusmanto, 2015: 235) berikut penjelasannya :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat suatu daerah yang tanpa kehadirannya maka program pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan apabila merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan persiapannya.

3. Merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Menurut pendapat Tjokromidjojo terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, yaitu kepemimpinan dan komunikasi. Berikut penjelasan kepemimpinan dan komunikasi kaitannya dengan partisipasi (dalam Girsang, 2011: 12):

- a. Faktor Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam hal ini adalah kemampuan mempengaruhi masyarakat agar masyarakat bergerak dalam partisipasi, agar hal tersebut tercapai dibutuhkan pemimpin yang memiliki kualitas

- b. Faktor Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini adalah proses pemberian informasi agar gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana tentang pembangunan dapat dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balasan yang positif atau dukungan terkait dengan pembangunan tersebut.

Berdasarkan teori dari Tjokromidjojo (dalam Girsang 2011: 12) ditemukan bahwa kepemimpinan dan komunikasi merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, tetapi apabila dibandingkan dengan keadaan pembangunan Kampung Tematik Susu Perah maka ke dua faktor tersebut masih memiliki beberapa masalah. Masalah kepemimpinan pada pembangunan Kampung Tematik Susu Perah terletak pada belum adanya ajakan dari pemimpin dalam hal ini Lurah Gedawang kepada masyarakat Kelurahan

Gedawang secara luas untuk ikut mengelola pembangunan Kampung Tematik Susu Perah, sedangkan masalah komunikasi terletak pada kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kelurahan Gedawang, sehingga kebanyakan masyarakat hanya sekedar mengetahui keberadaan Kampung Tematik Susu Perah, tanpa mengerti manfaat dari pembangunan Kampung Tematik Susu Perah.

Menurut teori tentang pentingnya partisipasi, kepemimpinan dan komunikasi serta kondisi lapangan, membuat penulis memilih partisipasi menjadi fokus pada penelitian ini dan kepemimpinan serta komunikasi sebagai variabel jika dibandingkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi. Pertimbangan tersebut membuat penulis perlu menguji apakah teori yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan komunikasi berpengaruh terhadap partisipasi juga berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaruh Kepemimpinan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ?
2. Bagaimanakah Pengaruh Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang?
3. Bagaimanakah Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi secara bersama-sama terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah pada sub bab sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi secara bersama-sama terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan tentang Administrasi Publik utamanya mengenai partisipasi masyarakat, kepemimpinan dan komunikasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan evaluasi dan saran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
2. Bagi pembaca, dapat menjadi sumber informasi mengenai Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dalam penelitian yang sama, yaitu mengenai hubungan kepemimpinan dan komunikasi terhadap partisipasi pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang, Edisi Terbit, Judul	Masalah Penelitian	Teori yang dipakai	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Yudhiansyah Eka Saputra, 2016, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, studi kasus : Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. (SKRIPSI, Departemen Sains) Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, ITB)	Perbedaan signifikan antara pembangunan desa dan kota	Partisipasi	Ada hubungan antara faktor internal (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan) dan faktor eksternal (interaksi dan transparansi) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
	Lisbet Juwita Girsang, 2011, Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Perbaikan Prasarana Jalan (Kasus: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Megamendung, Bogor) (SKRIPSI Departemen Sains	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat utamanya dalam tahap pengambilan keputusan	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi	Ada pengaruh antara tim pendamping kegiatan dengan partisipasi masyarakat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan Komunikasi, Fakultas Ekologi Manusia, IPB)			
	Cicuk Kusmarianto, 2012, Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman (Jurnal, PARADIGMA Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 1, No 2, Desember 2012)	Tingkat partisipasi rendah	Pembangunan desa, partisipasi, komunikasi, kepemimpinan	Semakin baik kepemimpinan yang didukung oleh komunikasi yang baik pula maka partisipasi masyarakat akan meningkat
	Anindya Putri Tamara, 2018, Kajian Pelaksanaan Konsep Kampung Tematik di Kampung Hidroponik, Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang (Jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume 6 Nomor 1, April 2018, 40-57)	Tidak berjalannya konsep kampung tematik	Pemberdayaan dan identifikasi wilayah	Tidak berjalannya pelaksanaan Kampung Tematik Hidroponik disebabkan karena masyarakat yang kurang terampil dan potensi alam sekitar tidak sesuai dengan tema kampung tematik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Arif Wahyu Kristianto, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik) (Jurnal, ITS)	Peranan dan partisipasi masyarakat rendah dalam pembangunan	Partisipasi	Cara-cara yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

Berikut adalah penjelasan singkat menurut tabel di atas :

Penelitian terdahulu karangan Yudhiansyah Eka Saputra berjudul Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Penelitian ini berupa Skripsi dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, ITB. Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan pembangunan di kota yang terlalu cepat dibandingkan dengan pembangunan di desa. Menurut Yudhiansyah partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kampung Rawa, sehingga digunakan teori partisipasi untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi berlaku pada pembangunan Kampung Rawa atau tidak. Perbedaan penelitian terdahulu milik Yudhiansyah dengan penelitian penulis terletak pada lokus pembangunan dan fokus pembangunan. Pembangunan

pada penelitian Yudhiansyah terletak di Kampung Rawa, sedangkan pembangunan pada penelitian penulis terletak di Kampung Tematik Susu Perah Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Perbedaan fokus terletak pada faktor-faktor partisipasi yang digunakan. Faktor-faktor yang digunakan oleh Yudhiansyah hampir seluruhnya, sedangkan faktor-faktor yang digunakan penulis hanya kepemimpinan dan komunikasi.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah milik Lisbet Juwita Girsang, 2014, yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Perbaikan Prasarana Jalan (Kasus: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Megamendung, Bogor) Penelitian ini merupakan skripsi dari Departemen Sains dan Komunikasi, Fakultas Ekologi Manusia, IPB. Skripsi karya Lisbet Juwita Girsang memiliki permasalahan berupa Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat utamanya dalam tahap pengambilan keputusan. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak di teori yang digunakan, jika teori yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah semua faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, sedangkan penulis hanya menggunakan 2 teori saja, yaitu kepemimpinan dan komunikasi. Kesamaan pada penelitian ini adalah sama-sama memiliki partisipasi yang kurang dalam penelitiannya.

Penelitian terdahulu lainnya dikemukakan oleh Cicuk Kusmarianto, 2012 dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Penelitian terdahulu ini merupakan Jurnal dari PARADIGMA

Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 1, No 2, Desember 2012. Latar belakang penelitian karya Cicuk Kusmarianto adalah permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, karena itu fokus penelitian Cicuk dengan penelitian penulis adalah sama, yaitu partisipasi dan komunikasi serta kepemimpinan sebagai faktor yang mempengaruhi partisipasi dan ingin diketahui pengaruhnya. Perbedaan antara penelitian Cicuk dengan penulis terletak pada bagian lokus. Lokus penelitian Cicuk adalah Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, sedangkan lokus penelitian penulis adalah Kampung Tematik Susu Perah, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Perbedaan lainnya terletak pada cakupan penelitian. Penelitian Cicuk memiliki cakupan yang cukup luas yaitu seluruh Desa Donoharjo, sedangkan penelitian penulis memiliki cakupan yang relatif lebih kecil yaitu sebatas Kampung Tematik Susu Perah yang terletak di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Berbeda dengan Anindya Putri Tamara yang menulis tentang Kajian Pelaksanaan Konsep Kampung Tematik di Kampung Hidroponik, Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Penelitian berupa jurnal pada Jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume 6 Nomor 1, April 2018, 40-57. Perbedaan ini terletak pada masalah yang ada yaitu tidak berlanjutannya kampung tematik, sedangkan penelitian penulis permasalahannya adalah kurangnya partisipasi. Teori yang digunakan pun berbeda dengan teori pada penelitian terdahulu lainnya dan penelitian penulis. Penelitian Anindya menggunakan teori pemberdayaan dan

identifikasi masalah, sedangkan teori pada penelitian terdahulu lainnya dan teori pada penelitian penulis menggunakan teori partisipasi.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah karangan Arif Wahyu Kristianto. Penelitian Arif berjudul Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). Penelitian ini merupakan sebuah Jurnal yang diupload ITS. Jurnal karya Arif Wahyu Kristianto memiliki masalah berupa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Permasalahan tersebut sejalan dengan permasalahan pada penelitian penulis. Persamaan lainnya terletak pada teori yang digunakan yaitu partisipasi.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi menurut A Dunsire dalam (Keban, 2008: 2) adalah arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditemukan bahwa administrasi bukanlah sekedar pekerjaan ketatausahaan saja, akan tetapi lebih luas dari pada itu.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2010: 14) mengatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Publik memiliki arti lebih dari pada sebuah negara. Publik dalam penelitian ini diartikan sebagai masyarakat, dengan maksud memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (Syafiie, 2010: 18)

Berdasarkan pengertian sebelumnya, maka administrasi publik memiliki arti sebagai organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah serta suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara (Pasolong, 2013: 9) Menurut Candler dan Plano (dalam Keban, 2008: 3) administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2008: 31-33) ada lima paradigma administrasi publik, yaitu: Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi; Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi; Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik; Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi; dan Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Berikut adalah penjelasannya :

1. Paradigma I Administrasi Publik sebagai Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926) Goodnow mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari

kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan judikatif bertugas membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Sayangnya dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek lokus saja yaitu *government bureaucracy*, tetapi fokus atau metode yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

2. Paradigma II Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937) Memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai lokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut disebut dengan POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating dan Budgeting*) yang dapat diterapkan di mana saja, tetapi lokusnya tidak diungkapkan secara jelas.
3. Paradigma III Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970) Paradigma ini memiliki lokus yaitu birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan.
4. Paradigma IV Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970) Fokus paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, seperti metode kuantitatif, analisis sistem dan

riset operasi. Semua fokus yang dikembangkan paradigma ini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya di administrasi bisnis tetapi juga publik, karena itu lokusnya menjadi tidak jelas.

5. Paradigma V Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang) Paradigma ini sudah memiliki lokus dan fokus yang jelas. Fokusnya berupa teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

G.Shabbir Cheema (dalam Keban 2008: 37) mengungkapkan ada empat fase paradigma administrasi publik. Empat fase tersebut adalah :

1. *Traditional Public Administration*. Berorientasi pada herarki, kontribusi, ketidakberpihakan, standardisasi, legal-rational, otoritas dan profesionalitas.
2. *Public Management*. Merumuskan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian sumber daya, efektivitas, orientasi pada pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar, lebih sensitif terhadap kepentingan publik. Paradigma ini menyarankan agar peran swasta lebih besar.
3. *New Public Management*. Mengarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi pada hasil, *outsourcing* dan *contracting out* serta promosi etika profesi dan manajemen anggaran berbasis kinerja.
4. *Governance*. Suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan di mana urusan-urusan ekonomi, sosial dan politik dikelola melalui interaksi antara

masyarakat, pemerintah dan swasta. Intinya esensi paradigma ini adalah memperkuat interaksi antar ketiga aktor tersebut.

UNDP menggunakan istilah *Good Governance*. Adapun karakteristik *Good Governance* menurut UNDP adalah sebagai berikut :

1. *Participation*, artinya setiap orang harus diberi kesempatan untuk bersuara dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung
2. *Rule of Law*, artinya aturan atau hukum haruslah adil dan tegak tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, artinya keterbukaan harus dibangun di atas aliran informasi yang bebas.
4. *Responsiveness*, artinya proses yang ada haruslah diarahkan untuk melayani para pemangku kepentingan atau stakeholder.
5. *Consensus Orientation*, artinya harus ada proses mediasi sampai pada konsesus umum yang didasarkan pada kepentingan kelompok.
6. *Equity*, artinya setiap orang berhak memiliki dan mempertahankan kesejahteraannya.
7. *Effectiveness dan efficiency*, artinya proses haruslah dapat memenuhi kebutuhan manusia melalui pemanfaatan terbaik sumber daya- sumber daya yang ada.
8. *Accountability*, yaitu bahwa para pengambil keputusan di pemerintah, sektor publik dan organisasi masyarakat madani harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskannya kepada publik sekaligus kepada pemangku kepentingan.

9. *Strategic Vission*, artinya pemerintah dan masyarakat haruslah memiliki prespektif yang luas terhadap pembangunan manusia dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan sosial budaya.

Menurut penjelasan mengenai konsep dan paradigma Administrasi Publik maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah suatu proses bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik yang sudah ada melalui prinsip-prinsip manajemen publik agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan jika manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua hal penting dari administrasi publik, erat kaitannya dan tidak mungkin untuk dipisahkan.

Penelitian ini termasuk dalam paradigma ke empat yaitu Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi, karena penelitian ini memiliki fokus yaitu teori perilaku berupa kepemimpinan dan komunikasi serta metode kuantitatif dengan lokus berupa kepentingan masyarakat Kelurahan Gedawang. Hal tersebut sesuai dengan Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi, yaitu paradigma yang memiliki fokus teori-teori perilaku organisasi dan metode kuantitatif serta lokus Administrasi Publik yang mengurus kepentingan masyarakat.

Selain paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, paradigma lain yang sesuai dengan penelitian ini adalah paradigma *Good Governance*. Hal tersebut dibuktikan dengan kesesuaian antara fokus yang

diangkat yaitu partisipasi. Pada paradigma *Good Governance* disebutkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan yang dibuat pemerintah, dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan Kampung Tematik Susu Perah Kelurahan Gedawang.

1.5.3 Manajemen Publik

Terdapat beberapa dimensi dalam Administrasi Publik, salah satunya Manajemen Publik. Manajemen Publik adalah proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) (Keban, 2008: 11)

Sukidin dan Darmadi (2011: 11) menyebutkan bahwa konsep dari administrasi publik terdiri dari konsentrasi manajemen publik dan kebijakan publik. Manajemen publik merupakan suatu konsep di mana tujuannya adalah untuk mengatur berjalannya semua hal yang berkaitan dengan perjalanan administrasi publik di sebuah negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen public adalah proses pengelolaan pemerintah berlandaskan kebijakan yang sudah ada untuk mencapai tujuan pemerintah. Penjelasan tersebut mengartikan bahwa Kebijakan Publik dan Manajemen Publik tidak dapat saling dipisahkan, karena Manajemen Publik adalah sebuah alat yang digunakan untuk melaksanakan Kebijakan Publik.

1.5.4 Partisipasi Masyarakat

1.5.4.1 Definisi Partisipasi

Partisipasi adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (H.A.R.Tilaar, 2009: 287). Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong mereka atas kehendak sendiri menurut kemampuan yang ada untuk mengambil bagian dalam usaha mencapai tujuan bersama (Rohman dkk, 2009: 46) Selain itu menurut Kusmariato partisipasi haruslah menyumbang kontribusi baik barang, jasa maupun pikiran (Kusmariato, 2012: 50)

Partisipasi masyarakat atau partisipasi publik tidak dapat dipisahkan dari Administrasi Publik, karena partisipasi publik merupakan bagian dari fokus kajian Administrasi Publik (Mardiyanta: 2013) Pendapat tersebut dapat terlihat dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan pengambilan keputusan yang baik dari pemerintah haruslah mengikutsertakan masyarakat, begitu pula dalam pelaksanaan keputusannya. Pelaksanaan keputusan haruslah mengikutsertakan masyarakat. Intinya partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam proses Administrasi Publik, tanpa masyarakat pemerintah tidak akan mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan akan kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan program-programnya. Bentuk nyata dari kajian partisipasi dalam Administrasi Publik akan dibahas pada penelitian ini,

yang mana penelitian ini akan melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi serta bagaimana masyarakat mengelola program dari pemerintah yaitu pembangunan Kampung Tematik Susu Perah.

Menurut penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah proses keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yang mempengaruhi hidup mereka. Pembangunan haruslah dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat, bukan hanya pemerintah saja, karena masyarakat sendiri yang paling mengetahui kebutuhan yang diperlukan.

1.5.4.2 Tujuan Partisipasi

Partisipasi sering disebut juga dengan peran serta. Menurut Sanof (dalam Ngusmanto, 2015: 137) ada tiga tujuan peran serta, berikut adalah penjelasannya :

1. Melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya, meningkatkan kepercayaan mereka, sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam sistem yang telah ada ketika mereka menghadapi suatu masalah.
2. Menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan (kualitas) dari perencanaan dan keputusannya.
3. Mengingat rasa kebersamaan (*sense of community*) dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan lain dari partisipasi yaitu meningkatnya kemampuan setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan selanjutnya untuk jangka yang lebih panjang. (Soeatri, 2014: 226)

Menurut penjelasan di atas, tujuan partisipasi sesungguhnya adalah untuk memberdayakan masyarakat daerah setempat agar dapat ikut serta dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian hingga menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

1.5.4.3 Urgensitas Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam program pembangunan. Menurut Conyers (dalam Ngusmanto, 2015: 235) ada beberapa hal tentang pentingnya partisipasi masyarakat, berikut penjelasannya :

4. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat suatu daerah yang tanpa kehadirannya maka program pembangunan akan gagal.
5. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan apabila merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan persiapannya.
6. Merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pendapat lain tentang partisipasi dijelaskan oleh Anggara (2016: 289) tentang kelebihan partisipasi sehingga partisipasi itu penting, yaitu

1. Menjamin ketercapaian tujuan
2. Membangun kapasitas lokal
3. Meningkatkan cakupan pengambilan kebijakan
4. Target keuntungan yang lebih baik
5. Menjamin keberlanjutan
6. Menjamin suara kelompok marginal terutama kelompok miskin dan perempuan terakomodasi

Menurut penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam pembangunan. Tanpa adanya partisipasi pembangunan tidak akan berorientasi pada masyarakat.

1.5.4.4 Bentuk-bentuk Partisipasi

Ada banyak bentuk-bentuk partisipasi. Menurut Effendi dalam Rahayu (2018: 12) membagi partisipasi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal merupakan kondisi tertentu masyarakat ketika terlibat dalam suatu program dari pihak lain, dalam hubungannya masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

2. Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal adalah kondisi di mana masyarakat mempunyai prakarsa sendiri. Setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda pemulaan timbulnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut juga dikemukakan oleh Huraerah dalam Rahayu (2018:13), yaitu :

- a. Partisipasi buah pikiran
- b. Partisipasi tenaga, yaitu partisipasi yang diberikan berupa tenaga, semisal untuk perbaikan atau pembangunan desa.
- c. Partisipasi harta benda, yaitu partisipasi yang diberikan berupa tenaga, semisal untuk perbaikan atau pembangunan desa yang berupa uang, makanan dan sebagainya
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kerukunan

Menurut penjelasan tentang bentuk-bentuk partisipasi dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam bentuk partisipasi. Bentuk partisipasi mulai dari partisipasi yang berdasarkan penggerakannya hingga partisipasi berdasarkan bentuk peran yang diberikan.

1.5.4.5 Tahap-tahap Partisipasi

Menurut Muluk, partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penerimaan manfaat pembangunan (Muluk, 2009: 24) Partisipasi juga dapat dikatakan sebagai suatu proses. Menurut Tjokromidjojo (dalam Rohman dkk, 2009: 48) ada tiga tahapan proses partisipasi, berikut adalah penjelasannya :

1. Partisipasi dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan.

2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memiliki dan memanfaatkan hasil pembangunan secara berkeadilan.

Cohen dan Uphoff (dalam Saputra, 2016: 5) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
4. Tahap Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Tahap partisipasi juga dijelaskan oleh Arnstein (dalam Wicaksono, 2010:

20). Tahap partisipasi oleh Arnstein dibagi menjadi 8, berikut penjelasannya :

1. *Manipulation*

Mengatakan partisipasi, partisipan program secara formalitas termasuk dalam bagian partisipan program, tetapi tanpa adanya pelibatan dalam pelaksanaan program. Tujuannya adalah untuk dipakai sebagai formalitas semata dan untuk dimanfaatkan dukungannya. Tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi masyarakat yang murni, karena telah diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi oleh pihak penguasa.

2. *Therapy*

Pihak pembentuk program menganggap ketidakberdayaan sebagai kelemahan. Pembentuk program berpura-pura mengikutsertakan masyarakat dalam suatu perencanaan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan masalah dan bukannya menemukan penyebab masalah.

3. *Informing*

Memberi informasi kepada masyarakat akan hak, tanggung jawab, dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun sering kali pemberian informasi dari penguasa kepada masyarakat tersebut bersifat satu arah, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi. Ketika informasi disampaikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi

program. Komunikasi satu arah ini biasanya dengan menggunakan media pemberitaan yakni brosur dan poster.

4. *Consultation*

Meminta pendapat masyarakat merupakan suatu langkah logis menuju partisipasi penuh. Cara yang sering digunakan dalam tingkat ini adalah jejak pendapat, pertemuan warga, dan dengar pendapat.

Berdasarkan tahap-tahap partisipasi di atas maka dapat ditentukan beberapa tingkatan dalam partisipasi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam tingkat perencanaan hingga evaluasi atau berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan berpartisipasi dari pemerintah.

1.5.4.6 Faktor-faktor Partisipasi

Selain itu, menurut Tjokromidjojo (dalam Girsang, 2011: 12) mengungkapkan faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam partisipasi masyarakat adalah:

- a. Faktor kepemimpinan, dalam menggerakkan partisipasi sangat diperlukan adanya pimpinan dan kualitas;
- b. Faktor komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat.

Selain menurut Tjokromidjojo, faktor yang mempengaruhi partisipasi juga dikemukakan oleh Suroso (dalam Girsang, 2011: 10) Faktor tersebut adalah :

1. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari usia, pendidikan dan pekerjaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari komunikasi dan kepemimpinan.

Ada juga pendapat dari Plummer dan Taylor (dalam Anto, 2017: 96) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Berikut penjelasannya:

1. Faktor Eksternal

- a. Kebijakan legislative dan UU
- b. Hukum
- c. Tata kelola pemerintahan
- d. Kebijakan kepemimpinan
- e. Administrasi (struktur, hubungan, tanggung jawab, dan fungsi)

2. Faktor Internal

- a. Peran organisasi
- b. Kepemimpinan masyarakat
- c. Budaya
- d. Nilai dan Tradisi
- e. Etnis
- f. Jenis kelamin
- g. Pendidikan
- h. Status ekonomi
- i. Lapangan pekerjaan
- j. Keterampilan dan pengetahuan

1.5.4.7 Indikator Partisipasi

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berikut adalah penjelasannya (Kusmarianto, 2012: 51) :

1. Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam merencanakan pembangunan.
2. Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
3. Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam mempertanggung jawabkan pembangunan.
4. Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam menerima hasil pembangunan.

Cohen dan Uphoff (dalam Saputra, 2016: 7) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terdiri dari beberapa dimensi yaitu:

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan.

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Indikator dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan khususnya dalam perencanaan program pembangunan dapat dilihat melalui 5 indikator sebagai berikut :

1. Keterlibatan dalam rapat atau musyawarah,
2. Kesiediaan dalam memberikan data dan informasi,
3. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan,
4. Keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan
5. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan.

Mengenai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan meliputi 4 indikator, yaitu :

1. Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,
2. Kesiediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan ketrampilan,
3. Kesiediaan memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan, dan
4. Tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan

3. Keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil.

Partisipasi dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan memiliki beberapa indikator meliputi:

1. Pemahaman tentang hakikat pembangunan,
2. Kesiediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan,
3. Kesiediaan dalam melestarikan hasil-hasil pembangunan,
4. Kesiediaan dalam mengembangkan hasil pembangunan.

4. Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil.

Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil memiliki 7 indikator yang meliputi :

1. Adanya norma atau aturan standar,
2. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan,

3. Keaktifan dalam melakukan pengawasan,
4. Dampak pendapatan negara dan daerah,
5. Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja,
6. Dampak terhadap pengembangan sektor lain,
7. Pemberian saran dan kritik dari masyarakat.

1.5.5 Kepemimpinan

1.5.5.1 Definisi Kepemimpinan

Menurut Stoner (dalam Handoko 2015: 292), kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Terdapat tiga implikasi penting dari definisi tersebut. Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain (bawahan atau pengikut) Kedua, kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara para pemimpin dan anggota kelompok dan yang ketiga adalah pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahan agar dapat melaksanakan perintahnya.

Kepemimpinan menurut G.R Terry (dalam Purwanto, 2008: 63) adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin memiliki dua wewenang, yaitu wewenang formal dan wewenang personal. Wewenang formal adalah wewenang sah yang didapatkan karena kedudukannya sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Wewenang personal adalah wewenang yang didapatkan karena

wibawanya, misalnya karena usia, pendidikan, kepribadian, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan kelompok dan kepuasan bawahan.

Menurut penjelasan di atas, maka dapat didefinisikan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses pemberian pengaruh kepada sekelompok orang sesuai dengan tugasnya agar tujuan yang telah disepakati bersama tercapai. Mempengaruhi orang lain haruslah berpedoman pada nilai-nilai dan lingkungan yang ada agar kepemimpinan yang dilaksanakan dapat mewujudkan kebermanfaatan bagi seluruh elemen yang dipimpin. Suatu kepemimpinan juga memiliki beberapa sifat yang menurut para peneliti harus dimiliki oleh seorang pemimpin, tetapi perlu diingat bahwa walaupun semua sifat yang diinginkan dalam diri pemimpin belum tentu berlaku secara *absolut*.

1.5.5.2 Fungsi dan Jenis Kepemimpinan

Ada 2 fungsi kepemimpinan, yang pertama adalah fungsi yang berhubungan dengan tugas dan yang kedua adalah fungsi pemeliharaan kelompok. Fungsi pertama menyangkut pemberian saran penyelesaian, informasi, dan pendapat. Fungsi kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, pengarahannya perbedaan pendapat dan sebagainya (Handoko, 2015: 297) Menurut Siagian (2010: 30) ada 5 fungsi kepemimpinan, yaitu : penentu arah, wakil organisasi, komunikator, mediator dan integrator.

Berdasarkan 2 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berfungsi sebagai pemberian tugas, pemeliharaan kelompok maupun pelaksana kelompok. Kepemimpinan sangat penting bagi berjalannya sebuah kelompok

Menurut Sulistiyani (dalam Kusmarianto, 2012: 52) , kepemimpinan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu kepemimpinan formal dan informal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang mendapat kekuasaan karena legitimasi yang sah, sedangkan pemimpin nonformal adalah pemimpin yang mendapat kekuasaan karena faktor lain seperti ilmu agama, keturunan dan lain sebagainya. Seorang kepala kelurahan sebagai seorang pemimpin juga harus memiliki dua jenis kepemimpinan di dalam dirinya, sebagai pemimpin formal seorang lurah harus dapat menjalankan program-program yang diinstruksikan dari atas, sedangkan sebagai pemimpin informal seorang lurah harus dapat mengembangkan inisiatif guna menggerakkan kegiatan-kegiatan yang berdasar atas potensi kelurahannya.

1.5.5.3 Sumber-sumber Kepemimpinan

Menurut French dan Raven (dalam Indrawijaya, 2010: 138) Ada beberapa hal yang menjadikan seseorang pemimpin menjadi pemimpin, berikut adalah hal-hal tersebut :

1. Coersive Power

Sumber kepemimpinan seseorang dapat berupa kekuasaan yang dipunyainya untuk memaksakan kehendaknya. Singkatnya seseorang dapat mempunyai status pemimpin apabila pemimpin tersebut dapat memberikan hukuman kepada seseorang atau kelompok orang.

2. *Reward Power*

Kepemimpinan atas dasar mampu memberikan imbalan untuk mempengaruhi bawahan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

3. *Legimate Power*

Ketentuan resmi dari pejabat berwenang merupakan salah satu sumber yang menyebabkan seseorang mempunyai status pemimpin.

4. *Referent Power*

Kepemimpinan karena pengaruh hubungan dalam kelompok. Setiap kelompok pasti mengalami proses psikologi yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang mencontoh perilaku seseorang atau beberapa orang tersebut.

5. *Expert Power*

Seseorang akan mendapatkan status kepemimpinan apabila mempunyai keahlian. Keahlian tersebut digunakan untuk mempengaruhi bawahannya.

6. *Charismatic Power*

Seorang pemimpin mendapat status kepemimpinannya apabila memiliki karisma tertentu sehingga apabila seseorang melihat pada pandangan pertama akan muncul rasa ketertarikan.

1.5.5.4 Pendekatan Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan memiliki 3 pendekatan, yaitu pendekatan sifat, perilaku dan situasional. Pendekatan sifat memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak. Pendekatan perilaku bermaksud mengidentifikasi perilaku-perilaku pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan efektif.

Terakhir, pendekatan situasional yang menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektivitas kepemimpinan bervariasi, sesuai dengan kondisi masing-masing seperti kondisi bawahan, lingkungan organisasi, pengalaman masa lalu dan sebagainya (Handoko, 2015: 293)

Pendekatan sifat berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik pemimpin yang dikaitkan dengan keberhasilan pemimpin (Rivai dan Mulyadi, 2013: 7) Menurut Edwin Ghiselli (dalam Handoko, 2015: 295) seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang mengantarkan kepemimpinannya sebagai kepemimpinan yang bersifat efektif. Berikut adalah sifat-sifat tersebut:

1. Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain.
2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan sukses.
3. Kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya pikir
4. Ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan- keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cepat dan tepat.
5. Kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah.
6. Inisiatif atau kemampuan bertindak tidak tergantung, mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara-cara baru atau inovasi.

Bukan hanya menurut Edwin Ghiselli, Keith Davis (dalam Handoko, 2015: 295) juga mengungkapkan 4 sifat utama yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu pimpinan dalam memimpin, yaitu :

1. Kecerdasan.
2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial.
3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi.
4. Sikap-sikap hubungan manusiawi.

Sifat kepemimpinan dari Keith Davis maupun Edwin Ghiselli tidak memiliki perbedaan yang begitu berbeda. Keith Davis dan Edwin Ghiselli sama-sama menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan secara intelektual maupun kecerdasan emosional.

Pendekatan sifat dari teori kepemimpinan memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya adalah pendekatan sifat tidak dapat selalu menjadi tolok ukur keefektifan pemimpin dalam memimpin, karena pendekatan sifat hanya melihat pemimpin dari karakter yang dimiliki, belum dari kondisi lingkungan maupun bawahan yang dipimpin.

Pendekatan lain dari teori kepemimpinan adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku menekankan pada bagaimana pemimpin mendelegasikan tugas, memotivasi bawahan, dan berkomunikasi dengan bawahan. (Handoko, 2015: 296) Beberapa teori perilaku yang ada yaitu teori X dan Y dari Douglas McGregor dan teori Likert.

Douglas McGroger (dalam Handoko, 2015: 298) mengemukakan bahwa ada 2 anggapan perilaku seorang pemimpin tentang sifat dasar manusia, yaitu :

a. Anggapan Teori X

Anggapan teori X menyatakan bahwa rata-rata manusia berperilaku malas dan tidak menyukai pekerjaan hingga akhirnya manusia perlu diawasi diarahkan atau bahkan diancam agar menjalankan tugas. Anggapan teori X juga menyatakan bahwa perilaku manusia cenderung lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab dan menginginkan jaminan hidup.

b. Anggapan Teori Y

Anggapan teori Y mengemukakan bahwa penggunaan usaha fisik dan mental manusia dalam bekerja adalah kodrat manusia; pengawasan dan ancaman hukuman eksternal bukanlah satu-satunya cara untuk mengarahkan perilaku anggota agar mencapai tujuan organisasi; rata-rata manusia berperilaku belajar tidak hanya untuk menerima tetapi untuk mencari tanggungjawab; manusia juga memiliki perilaku untuk berimajinasi dan berkreaitifitas dalam penyelesaian masalah.

Pemimpin yang menganut anggapan-anggapan teori X cenderung menyukai gaya kepemimpinan otokratik, sedangkan pemimpin yang menggunakan teori Y lebih menyukai kepemimpinan gaya partisipatif atau demokratik.

McGregor bukan satu-satunya yang mengidentifikasi gaya kepemimpinan dalam pendekatan perilaku, Likert (dalam Handoko, 2015: 298) juga mengemukakan teori perilaku untuk menentukan kepemimpinan yang efektif

berdasarkan orientasi pegawai dan orientasi tugas. Berikut adalah tingkatan teori perilaku kepemimpinan Likert :

1. Sistem I

Pemimpin dalam gaya ini mempunyai sedikit kepercayaan kepada bawahan. Suka mengeksploitasi bawahan, dan bersikap paternalistik. Hanya membatasi proses pengambilan keputusan di tingkat atas saja. Pemimpin membuat semua keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan secara sendiri. Metode pelaksanaan kepemimpinan juga bersifat kaku.

2. Sistem II

Pemimpin menentukan perintah-perintah dan memberi bawahan kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah tersebut. Bawahan diberi fleksibilitas untuk melaksanakan tugas-tugas asalkan masih berdasarkan prosedur yang ditentukan.

3. Sistem III

Pemimpin menetapkan tujuan dan memberikan perintah setelah mendiskusikannya dengan bawahan. Bawahan dapat membuat keputusan-keputusan mereka sendiri tentang bagaimana bawahan mengerjakan tugas.

4. Sistem IV

Menurut Likert sistem IV adalah sistem yang paling efektif. Tujuan dan keputusan dibuat secara berkelompok, apabila pemimpin membuat keputusan secara formal maka saran dan pendapat dari bawahan juga dipertimbangkan dalam menentukan keputusan.

Berdasarkan teori perilaku dari McGroger maupun dari Likert diketahui bahwa keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak di unsur perilaku yang ada. Unsur pada McGroger hanya sebatas anggapan X (otokratik) dan Y (partisipatif) saja dan kurang terperinci, sedangkan teori dari Likert lebih terperinci.

Pendekatan perilaku lainnya ditemukan oleh Universitas Michigan. Kelompok Michigan mengemukakan 2 dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu: kepemimpinan berorientasi karyawan (orientasi hubungan dengan karyawan) dan berorientasi produksi (orientasi dengan tugas) (Yudiatmaja, 2013: 34) *Relationship oriented* merupakan perilaku yang menunjukkan bersahabat dengan bawahan, menunjukkan penyempurnaan, perhatian terhadap kontribusi bawahan dan memperhatikan kesejahteraan bawahan. Sedangkan *task oriented behavior* merupakan perilaku yang menunjukkan *planning/scheduling*, koordinasi, menentukan *supplier*, dan perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan (Sidharta, 2015: 48)

Pendekatan terakhir dalam teori kepemimpinan adalah pendekatan situasional. Pendekatan situasional muncul karena pendekatan sifat dan perilaku belum sepenuhnya dapat menjelaskan mengenai kepemimpinan yang efektif. Pendekatan situasional menggambarkan bahwa gaya yang digunakan bergantung pada faktor situasi, karyawan, tugas dan organisasi. Ada beberapa pendekatan situasional yaitu teori situasional dari Schmidt dan Fiedler.

Menurut Schmidt (dalam Handoko, 2015: 307) ada beberapa situasi yang perlu dipertimbangkan sebelum mengemukakan gaya kepemimpinan. Situasi itu disebut dengan kekuatan, yaitu :

1. Kekuatan dari dalam diri pemimpin.

Kekuatan dari dalam diri pemimpin mencakup : sistem nilai, kepercayaan terhadap bawahan, kecenderungan kepemimpinannya sendiri dan perasaan aman dan tidak aman.

2. Kekuatan dari dalam diri bawahan.

Kekuatan dari dalam diri bawahan meliputi : kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan peningkatan tanggung jawab, ketertarikan akan keahlian dan penanganan masalah serta harapan akan keterlibatan dalam pembuatan keputusan.

3. Kekuatan situasi

Kekuatan situasi mencakup : tipe organisasi, efektivitas kelompok, desakan waktu dan sifat masalah.

Pendekatan situasional yang dikemukakan oleh Fiedler (dalam Handoko, 2015: 309) disebut dengan *contingency*. Teori *Contingency* menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan dalam organisasi ditentukan oleh interaksi antara kepribadian pemimpin dengan situasi. Situasi yang dimaksud adalah : (1) situasi ketika pemimpin menguasai, mengendalikan dan mempengaruhi situasi; (2) situasi yang mengedepankan pemimpin dengan ketidakpastian. Fiedler mengidentifikasi tiga unsur dalam situasi ini untuk membantu menentukan gaya kepemimpinan yang efektif yaitu :

1. Hubungan pimpinan anggota.
2. Struktur tugas
3. Posisi kekuasaan pemimpin.

Ketiga unsur tersebut dapat dihitung mulai dari poin 1-8 dengan keterangan sebagai berikut dan hasilnya akan diketahui melalui gaya yang paling cocok apabila dipadukan dengan situasi yang ada :

Tabel 1.5
Teori *Contingency*

Kondisi	Hubungan Pemimpin dan anggota	Struktur Tugas	Kewibawaan kedudukan pemimpin	Gaya kepemimpinan efektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Baik	Tinggi	Kuat	Mementingkan tugas atau hasil (Gaya Otokratik)
II	Baik	Tinggi	Lemah	Mementingkan tugas atau hasil (Gaya Otokratik)
III	Baik	Rendah	Kuat	Mementingkan tugas atau hasil (Gaya Orientasi Hubungan)
IV	Baik	Rendah	Lemah	Mementingkan hubungan atau bawahan (Gaya Orientasi Hubungan)
V	Jelek	Tinggi	Kuat	Mementingkan hubungan atau bawahan (Gaya Orientasi Hubungan)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VI	Jelek	Tinggi	Lemah	Mementingkan hubungan atau bawahan (Gaya Orientasi Hubungan)
VII	Jelek	Rendah	Kuat	Mementingkan hubungan atau bawahan (Gaya Otokratik)
VIII	Jelek	Rendah	Lemah	Mementingkan tugas atau hasil (Gaya Otokratik)

Sumber : Handoko, (2015)

1.5.4.5 Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan aspek penting dalam mewujudkan tujuan kelompok. Menurut Thoha (2013:49) Gaya Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Bukan hanya menurut Thoha, Rivai (2014:42) juga menyatakan Gaya Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.

Hersey dan Blanchard (dalam Wibowo, 2011: 9) mengemukakan beberapa gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan tersebut didasarkan pada kepemimpinan orientasi tugas, kepemimpinan orientasi hubungan dan pertimbangan kematangan

bawahan. Kematangan bawahan (*maturity*) dapat dirumuskan sebagai suatu kemampuan dan kemauan dari orang-orang untuk bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri. Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kedewasaan bawahan, berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan, dan atau pengalaman, sedangkan kemauan adalah unsur yang lain dari kedewasaan berkaitan dengan keyakinan diri dan motivasi seseorang. Tingkat kedewasaan bawahan atau tingkat kesiapan pengikut secara kontinum terbagi dalam empat tingkat, yaitu: rendah (M1), rendah ke sedang (M2), sedang ke tinggi (M3), dan tinggi (M4).

Pemilihan gaya kepemimpinan bila dikaitkan dengan tingkat kedewasaan bawahan, adalah sebagai berikut :

a. Gaya Instruksi

Gaya intruksi adalah gaya yang sebaiknya diterapkan apabila tingkat kedewasaan rendah (M1) di mana bawahan tidak mampu dan tidak mau memikul tanggung jawab, maka gaya yang efektif adalah yang bersifat mengarahkan atau memerintah secara rinci tugas-tugas yang harus dilaksanakann (kapan, di mana, dengan apa dan sebagainya).

b. Gaya Konsultasi

Gaya intruksi adalah gaya yang sebaiknya diterapkan apabila tingkat kedewasaan rendah ke sedang (M2) yaitu bawahan tidak mampu tetapi berkeinginan kuat dan berusaha keras dapat melaksanakannya, maka gaya yang efektif adalah konsultasi. Gaya konsultasi adalah gaya kepemimpinan

yang mana pemimpin masih memberikan pengarahan tetapi melalui komunikasi dua arah membantu mempertahankan motivasi bawahan.

c. Gaya Partisipasi

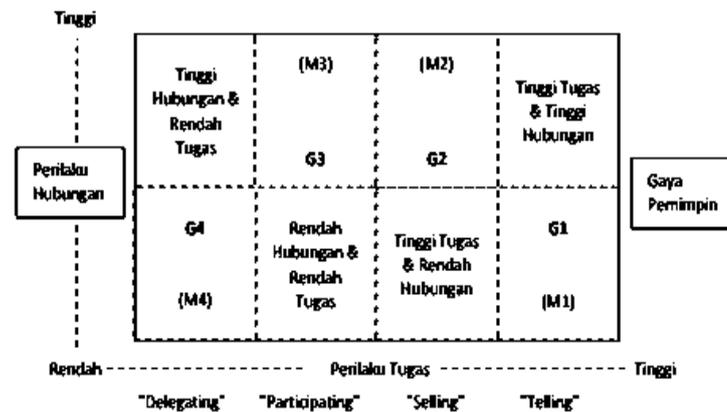
Gaya intruksi adalah gaya yang sebaiknya diterapkan apabila kedewasaan pada tingkat tiga (M3), yaitu bawahan mampu tetapi tidak ingin melakukan tanggung jawab maka gaya yang efektif adalah gaya partisipasi. Gaya partisipasi adalah gaya ketika pemimpin dan bawahan saling tukar menukar ide dalam pembuatan keputusan dengan peran pemimpin sebagai pemberi fasilitas dan berkomunikasi.

d. Gaya Delegasi

Gaya intruksi adalah gaya yang sebaiknya diterapkan apabila kedewasaan berada pada tingkat empat (M4), yakni bawahan mampu dan mau serta bersemangat tinggi, mereka bekerja dengan profesional, gaya kepemimpinan yang cocok adalah pendelegasian tugas, Gaya Delegasi adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang (seperti pembuatan keputusan) yang cukup besar pada bawahan sesuai dengan koridor yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah gambaran dari gaya kepemimpinan intruksi (*telling*), konsultasi (*selling*), partisipasi (*participating*) dan delegasi (*delegating*) sebagaimana gambaran berikut ini :

Gambar 1.3
Gaya Kepemimpinan Situasional



Sumber : Wibowo, Teori Kepemimpinan (2011)

Selain menurut Hersey dan Blanchard, Burns (dalam Wibowo, 2011: 11) juga mengemukakan gaya kepemimpinan yang terdiri dari gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang memandu atau memotivasi pengikut mereka, dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Berbeda dengan gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan, dan yang memiliki karisma.

Gaya kepemimpinan selanjutnya dikemukakan oleh Reddin (dalam Toha, 2012: 57) Menurut Reddin terdapat 8 gaya kepemimpinan yang dibagi menjadi dua yaitu gaya kepemimpinan efektif dan gaya kepemimpinan non efektif. Berikut adalah penjelasannya :

a. Gaya Kepemimpinan Efektif

1. Eksekutif

Gaya ini banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini disebut sebagai motivator yang baik, mau menetapkan standar kerja yang tinggi, dan berkehendak mengenal perbedaan di antara individu.

2. Pecinta Pengembangan

Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja dan perhatian minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini sangat memperhatikan pengembangan mereka sebagai seorang individu.

3. Otokratis yang baik

Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas, dan perhatian yang minimum terhadap hubungan kerja. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini mengetahui secara tepat apa yang ia inginkan dan bagaimana memperoleh yang diinginkan tersebut tanpa menyebabkan ketidaksegaran pihak lain

4. Birokrat

Gaya ini memberikan perhatian yang minimum terhadap baik tugas maupun hubungan kerja. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini sangat tertarik pada peraturan-peraturan dan menginginkan peraturan tersebut dipelihara, serta melakukan kontrol situasi secara teliti.

b. Gaya Kepemimpinan Non Efektif

5. Pecinta Kompromi

Gaya ini memberikan perhatian yang besar pada tugas dan hubungan kerja dalam situasi yang menekankan pada kompromi. Pemimpin yang bergaya seperti itu merupakan pembuat keputusan yang tidak bagus karena banyak tekanan yang mempengaruhinya.

6. *Missionary*

Gaya ini memberikan penekanan yang maksimal pada orang-orang dan hubungan kerja, tetapi memberikan perhatian yang minimum terhadap tugas dengan perilaku yang tidak sesuai. Pemimpin semacam ini hanya menilai keharmonisan sebagai suatu tujuan dalam dirinya sendiri.

7. Otokrat

Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu perilaku yang tidak sesuai. Pemimpin seperti ini tidak mempunyai kepercayaan pada orang lain, tidak menyenangkan, dan hanya tertarik pada jenis pekerjaan yang segera selesai.

8. Lari dari Tugas

Gaya ini sama sekali tidak memberikan perhatian baik pada tugas maupun pada hubungan kerja. Gaya ini tidak begitu terpuji karena manajer seperti ini menunjukkan sikap pasif dan tidak mau ikut campur secara aktif dan positif.

1.5.5.6 Tipe Kepemimpinan

Pada sebuah kepemimpinan terdapat tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan adalah bentuk atau pola atau jenis kepemimpinan, yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Menurut Siagian (dalam Hasriana, 2014: 16) ada 5 tipe kepemimpinan yaitu :

1. Tipe Otoriter

Ciri dari tipe kepemimpinan otoriter yang paling terlihat yaitu :

- a. Pemimpin dengan tipe otoriter sering menonjolkan dirinya berlebihan sehingga kurang dapat menerima orang lain yang lebih potensial dari pada dirinya.
- b. Selain itu tipe kepemimpinan otoriter bersifat gila kehormatan.
- c. Sangat menuntut loyalitas dari bawahan,
- d. Tipe kepemimpinan otoriter adalah tipe yang bersifat kaku.

2. Tipe Paternalistik

Ciri dari kepemimpinan tipe paternalistik yaitu :

- a. Pemimpin sebagai simbol organisasi
- b. Sering menonjolkan sifat paling tahu
- c. Memiliki sifat melindungi dengan tidak membiarkan bawahannya mengambil keputusan agar tidak muncul dampak negatif dari keputusannya
- d. Sentralistik dalam mengambil keputusan.

3. Tipe *Laissez Faire*

Ciri-ciri yang menonjol dari tipe kepemimpinan ialah:

- a. Gaya santai yang berangkat dari pandangan bahwa organisasi tidak menghadapi masalah yang serius dan walaupun ada, selalu dapat ditemukan penyelesaiannya
- b. Tidak senang mengambil risiko
- c. Gemar melimpahkan wewenang kepada para bawahan dan lebih menyenangi situasi bahwa para bawahanlah yang mengambil keputusan dan keberadaannya dalam organisasi lebih bersifat suportif.
- d. Enggan mengenakan sanksi, memperlakukan bawahan sebagai rekan, keserasian dalam interaksi organisasional dipandang sebagai etos yang perlu dipertahankan.

4. Tipe Demokratik

Ciri- ciri pokok dari tipe kepemimpinan demokratik yaitu :

- a. Mengakui harkat dan martabat manusia. Artinya selalu berupaya untuk selalu memperlakukan para bawahan dengan cara-cara yang manusiawi.
- b. Menerima pendapat yang mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur yang paling strategik dalam organisasi meskipun sumber daya dan dana lainnya tetap diakui sebagai sumber yang penting, seperti uang atau modal, mesin, materi, metode kerja, waktu dan informasi yang kesemuanya hanya bermakna apabila diolah dan digunakan oleh manusia.

- c. Para bawahannya adalah insan dengan jati diri yang khas dan karena itu harus diperlakukan dengan mempertimbangkan kekhasannya itu.
- d. Pemimpin yang demokratis tangguh membaca situasi yang dihadapi dan dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi tersebut.
- e. Gaya kepemimpinan yang demokratis rela dan mau melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada para bawahannya sedemikian rupa tanpa kehilangan kendali organisasional dan tetap bertanggung jawab atas tindakan para bawahannya itu.
- f. Mendorong para bawahan terapkan secara inovatif dalam pelaksanaan berkarya, berupa ide, teknik, dan cara baru.
- g. Tidak ragu-ragu membiarkan para bawahan mengambil risiko dengan catatan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh telah diperhitungkan dengan matang.

b) Tipe Kharismatik

Ciri yang menonjol dari tipe kharismatik adalah sebagai berikut :

- a. Percaya diri yang besar. Artinya para pemimpin yang kharismatik memiliki keyakinan yang mendalam tentang kemampuannya baik dalam arti berpikir maupun bertindak.
- b. Mempunyai visi. Visi adalah rumusan tentang masa depan yang diinginkan bagi organisasi yang berperan selaku pemberi arah yang akan ditempuh di masa depan.

- c. Kemampuan untuk mengartikulasikan visi. Hal itu dilakukan melalui proses sosialisasi yang sistemik sehingga terjadi internalisasi dalam diri para anggota organisasi.
- d. Keyakinan yang kuat tentang tepatnya visi yang dinyatakannya kepada para bawahan.

Tipe kepemimpinan juga dikemukakan oleh Conway (dalam Enceng dan Aslichati, 2017: 144) sebagai berikut :

1. *Crowd-compller*,

Pemimpin mencapai tujuan dengan cara membakar semangat para pengikut dengan pandangan-pandangannya.

2. *Crowd-exponent*,

Pemimpin merasakan dan mengekspresikan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

3. *Crowd-representative*,

Pemimpin hanya dengan bermodalkan suaranya saja pemimpin membentuk pendapat dari rakyatnya.

Berdasarkan tipe kepemimpinan dari para tokoh tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tipe kepemimpinan dapat dilihat dari gaya kepemimpinan pemimpin dalam mengatur atau mempengaruhi bawahan. Tipe kepemimpinan juga dapat ditentukan dari bagaimana karakter asli dari pemimpin itu sendiri.

1.5.5.7 Indikator Kepemimpinan

Menurut beberapa penjelasan akan teori kepemimpinan, maka berikut penulis menggunakan teori dari Universitas Michigan yaitu kepemimpinan orientasi hubungan dan kepemimpinan orientasi tugas dikaitkan dengan teori gaya kepemimpinan situasional. Alasan penulis menggunakan teori ini karena penulis rasa teori ini yang paling cocok diterapkan pada penelitian penulis, berikut penjelasannya:

1. Dimensi Orientasi Tugas
 - a. Pemimpin memberikan tugas dan tanggungjawab kepada anggota sesuai kemampuannya
 - b. Pemimpin memberikan intruksi yang jelas kepada anggota tentang tugas yang harus dilaksanakan
 - c. Pemimpin mengawasi kegiatan anggota
2. Dimensi Orientasi Hubungan
 - a) Pemimpin dan anggota membuat keputusan secara bersama-sama.
 - b) Pemimpin dan anggota saling bertukar pendapat atau ide
 - c) Pemimpin memberikan solusi dan motivasi atas permasalahan yang dialami anggota.

Selain menurut Thoha, Pasolong (2013: 111) menjelaskan beberapa dimensi kepemimpinan yang juga dijabarkan dalam beberapa indikator seperti berikut :

1. Kecakapan dalam Kelompok
 - a) Memiliki kecakapan

- b) Menduduki suatu posisi di kelompok
- c) Mempengaruhi orang-orang dalam kelompok
- d) Mengkoordinasi kelompok
- e) Mengarahkan kelompok mencapai tujuan

2. Kepemimpinan Karismatik

- b) Memiliki visi, misi, sasaran dan tujuan serta program yang jelas
- c) Selalu konsisten dan fokus terhadap suatu permasalahan
- d) Selalu mengkomunikasikan visi dan misi dengan efektif
- e) Mengetahui kelemahan, kekuatan dan manfaat

1.5.6 Komunikasi

1.5.6.1 Definisi Komunikasi

Menurut Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain (Handoko, 2015: 270) Komunikasi menurut R.C. Davis (dalam Purwanto, 2008: 64) adalah sebagai tahap dari proses kepemimpinan, yang memindahkan ide seseorang ke orang lain untuk digunakan dalam fungsi-fungsinya memimpin pekerjaan. Sementara itu, Hasibuan (dalam Purwanto, 2008: 64) menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan lambang-lambang yang mengandung pengertian antar individu.

Komunikasi merupakan suatu hal yang luas. Salah satu spesifikasi dari komunikasi adalah komunikasi publik. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. (Arni, 2008: 7)

Menurut penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan informasi dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi tercapainya tujuan. Informasi yang disampaikan dapat berupa simbol-simbol, kata-kata, atau informasi yang sudah jelas maksud dan tujuannya.

1.5.6.2 Proses dan Unsur Komunikasi

Komunikasi adalah suatu hal yang memiliki proses. Model proses komunikasi yang paling sederhana adalah sebagai berikut :

Gambar 1.4

Model Proses Komunikasi Sederhana

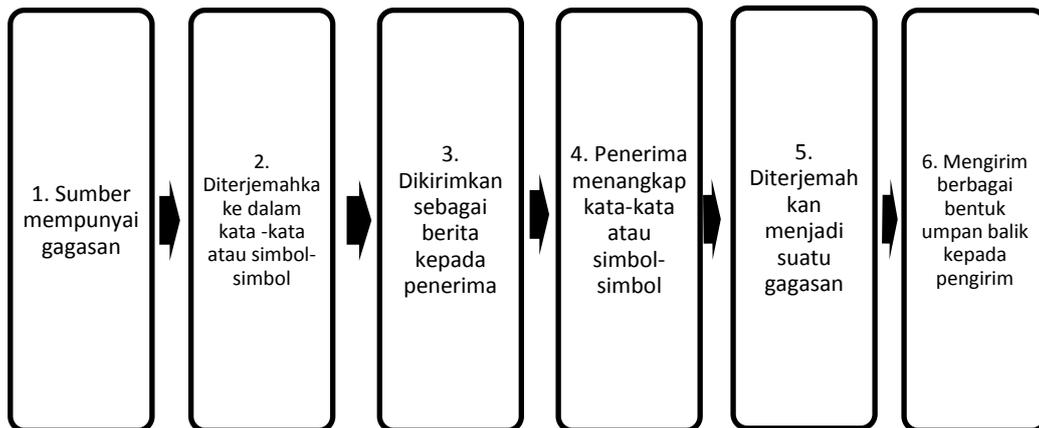


Sumber : Handoko, Manajemen Edisi 2 (2011)

Model di atas menunjukkan tiga unsur esensi komunikasi, yaitu: pengirim; berita (informasi yang diberikan) dan penerima, jika salah satu unsur tersebut hilang maka komunikasi tidak akan dapat berlangsung. Contohnya, seseorang dapat mengirimkan berita tetapi bila tidak ada yang menerima atau mendengar, komunikasi tidak akan terjadi. (Handoko, 2015: 272)

Model proses komunikasi yang lebih terperinci, dengan unsur-unsur penting yang terlihat dalam komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.5
Proses Komunikasi



Sumber : Handoko, Manajemen Edisi 2 (2011)

Berdasarkan gambaran proses komunikasi di atas maka dapat ditemukan bahwa unsur-unsur komunikasi terdiri sebagai berikut (Handoko, 2015: 274) :

1. Sumber

Sumber mengendalikan macam berita yang dikirim, susunan yang digunakan dan melalui saluran mana berita akan disampaikan.

2. Pengubahan Berita ke dalam Sandi atau Kode

Mengubah berita ke dalam berbagai bentuk simbol-simbol verbal atau nonverbal yang mampu memindahkan pengertian, seperti kata-kata percakapan atau tulisan, angka gerakan maupun kegiatan. Sebuah komunikasi mengharuskan pengirim berita bukan hanya memikirkan apa yang akan dikatakan tetapi memikirkan bagaimana hal itu akan disajikan agar pengaruh yang diinginkan dari penerima terpenuhi. Berita harus disesuaikan dengan

tingkat pemahaman, kepentingan dan kebutuhan penerima untuk mencapai konsekuensi-konsekuensi yang diinginkan.

3. Pengiriman Berita.

Pengiriman berita dapat dilakukan berdasarkan jenis komunikasinya. Jenis komunikasi dalam hal ini yaitu komunikasi lisan dan tertulis, jika terjadi komunikasi lisan maka pengiriman berita dapat dilakukan melalui saluran seperti telpon; orang secara langsung atau video, sedangkan apabila komunikasi tertulis maka dapat dilakukan melalui saluran seperti memo, surat, catatan, dan koran.

4. Penerimaan Berita

Orang-orang dapat menerima berita melalui ke lima panca indera mereka (penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan dan penciuman) Pengirim berita belum lengkap atau tidak akan terjadi komunikasi apabila suatu pihak belum menerima berita.

5. Pengartiaan atau Penerjemahan Kembali Berita.

Pengartian simbol-simbol penerima dapat dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan, pendidikan, lingkungan, praduga, dan gangguan di sekitarnya.

6. Umpan Balik.

Penerima mungkin akan menyampaikan berita balasan yang ditujukan kepada pengirim mula-mula atau orang lain.

1.5.6.3 Tipe Komunikasi

Ada beberapa tipe-tipe komunikasi. Menurut Cangara (2010: 34) ada 4 tipe komunikasi, berikut adalah penjelasannya:

1. Komunikasi dengan Diri Sendiri (*Intra Communication*)

Proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri.

2. Komunikasi Antar Pribadi (*Intrapersonal Communication*)

Proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi antar pribadi dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil.

3. Komunikasi Publik (*Public Communication*)

Komunikasi televisi adalah komunikasi yang mana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara disampaikan dalam situasi tatap muka di depan khalayak banyak. Penyampaian pesan berlangsung secara berkelanjutan dan terencana.

4. Komunikasi Massa (*Mass Communication*)

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang berlangsung di mana pesan yang dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya masal melalui alat-alat mekanis, seperti radio, televisi, dan surat kabar.

Tipe komunikasi lainnya adalah tipe komunikasi organisasi. Menurut hierarki dan kemasakan keresmian, komunikasi organisasi dibagi menjadi dua yaitu komunikasi vertikal dan horisontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terdiri dari komunikasi ke atas dan ke bawah. Tujuan komunikasi ke bawah adalah memberikan pengarahan, informasi, instruksi dan nasihat atasan kepada bawahan, sedangkan komunikasi ke atas tujuannya untuk memberikan laporan, penjelasan,

gagasan dan permintaan agar diberikan suatu keputusan. Tipe komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi horisontal. Komunikasi horisontal adalah komunikasi antara anggota kelompok tanpa melihat hierarki yang ada. (Handoko, 2015: 280)

Penjelasan mengenai komunikasi horisontal dan vertikal juga dijelaskan oleh Robbins. Robbins menjelaskan bahwa komunikasi vertikal dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi ke bawah yang tujuannya adalah menetapkan sasaran; memberikan instruksi pekerjaan; menginformasikan kebijakan dan prosedur ke bawahan; dan lain sebagainya, sedangkan komunikasi ke atas digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan; menginformasikan mereka mengenai kemajuan ke sasaran dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Berbeda dengan komunikasi vertikal, komunikasi horisontal adalah komunikasi yang terjadi antara anggota kelompok kerja yang sama, di antara manajer pada tingkat yang sama, atau di antara setiap personel yang secara horizontal disebut komunikasi horizontal (Robbins, 2008: 394-395). Pengertian komunikasi horisontal dan vertikal menurut Handoko maupun Robbins tidak memiliki banyak perbedaan, keduanya memiliki kesamaan penjelasan.

Menurut penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki banyak tipe. Tipe-tipe tersebut dapat dikategorikan berdasarkan situasi dan kondisi komunikasi berlangsung.

1.5.6.4 Indikator Komunikasi

Seorang yang mengadakan komunikasi dengan frekuensi dan intensitas tinggi biasanya akan mudah menerima inovasi, lebih tanggap, tidak mudah curiga

dengan hal-hal baru yang masuk walaupun lebih selektif. Berkaitan dengan pembangunan kampung tematik, maka seseorang yang berkomunikasi dengan frekuensi dan intensitas tinggi akan lebih mudah memahami, menerima dan mempraktekan metode-metode baru yang dianjurkan oleh kepala kelurahan. (Kusmarianto, 2012: 55) Indikator yang digunakan untuk mengukur komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Frekuensi pemberian informasi langsung/ lisan.
2. Frekuensi pemberian informasi melalui media tradisional.
3. Frekuensi pemberian informasi melalui media modern.
4. Frekuensi komunikasi dalam kelompok.

Komunikasi juga dapat dinilai berdasarkan unsur-unsur komunikasi. Menurut Sitorus dalam Patanduk (2014: 50) dimensi dan indikator komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Komunikator, yaitu unsur yang menyampaikan pesan
 - a. Komunikator menyampaikan pesan dengan jelas
 - b. Komunikator tanggap dengan umpan balik yang diberikan komunikan
 - c. Pesan yang disampaikan komunikator menarik perhatian komunikan
2. Pesan, yaitu informasi yang disampaikan oleh komunikator
 - a. Pesan yang disampaikan komunikator bersifat jelas
 - b. Pesan yang disampaikan komunikator sesuai dengan situasi dan kondisi komunikan
 - c. Pesan yang disampaikan komunikator dapat merubah komunikan ke arah yang lebih baik

3. Saluran, yaitu media yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan
 - a. Adanya komunikasi antara komunikan dan komunikator secara pribadi
 - b. Adanya pertemuan (rapat) antara komunikator dengan komunikan
 - c. Komunikasi antara pihak komunikan dengan komunikator memanfaatkan jaringan
 - d. Komunikasi antara pihak komunikan dengan komunikator memanfaatkan media massa
4. Komunikan, yaitu unsur yang menerima pesan
 - a. Komunikan merespon dengan baik informasi yang diberikan komunikator
 - b. Komunikan mampu berubah ke arah yang lebih baik setelah mendapat informasi dari komunikator
 - c. Komunikan menjalin hubungan yang baik dengan komunikator
5. Efek, yaitu pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikan dengan komunikator
 - a. Lingkungan mendukung komunikator dan komunikan berkomunikasi
 - b. Suasana dialogis
 - c. Komunikasi antara komunikator dan komunikan bersifat terbuka
 - d. Ada tindak lanjut setelah adanya komunikasi antara komunikan dengan komunikator

1.5.7 Pengaruh Kepemimpinan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi individu atau kelompok yang mana didalamnya terdapat gaya dasar kepemimpinan dan kematangan pengikut atau bawahan. Kepemimpinan bukan hanya diukur berdasarkan kemampuan pemimpin tetapi juga berdasarkan kondisi bawahan. Semakin baik kepemimpinan maka akan sebaik pula partisipasi masyarakat. Sebaliknya, semakin buruk kepemimpinan maka akan semakin buruk juga partisipasi masyarakatnya.

Contoh, ketika Lurah Gedawang sudah menyesuaikan kepemimpinannya terhadap situasu kematangan Masyarakat Gedawang maka partisipasi masyarakat akan baik. Sebaliknya, kepemimpinan Lurah Gedawang belum menyesuaikan dengan situasi kematangan Masyarakat Gedawang maka partisipasi masyarakat akan buruk juga.

1.5.8 Pengaruh Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Komunikasi merupakan suatu proses pemberian informasi dari satu orang atau kelompok ke satu orang atau kelompok lain yang mana di dalamnya terdapat unsur komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek. Semakin baik komunikasi maka akan sebaik pula partisipasi masyarakat. Sebaliknya, semakin buruk komunikasi maka akan semakin buruk juga partisipasi masyarakatnya.

Contoh, ketika komunikator menyampaikan pesan dengan jelas maka partisipasi masyarakat akan baik. Sebaliknya, apabila pesan yang disampaikan komunikator tidak jelas maka partisipasi masyarakat akan rendah juga.

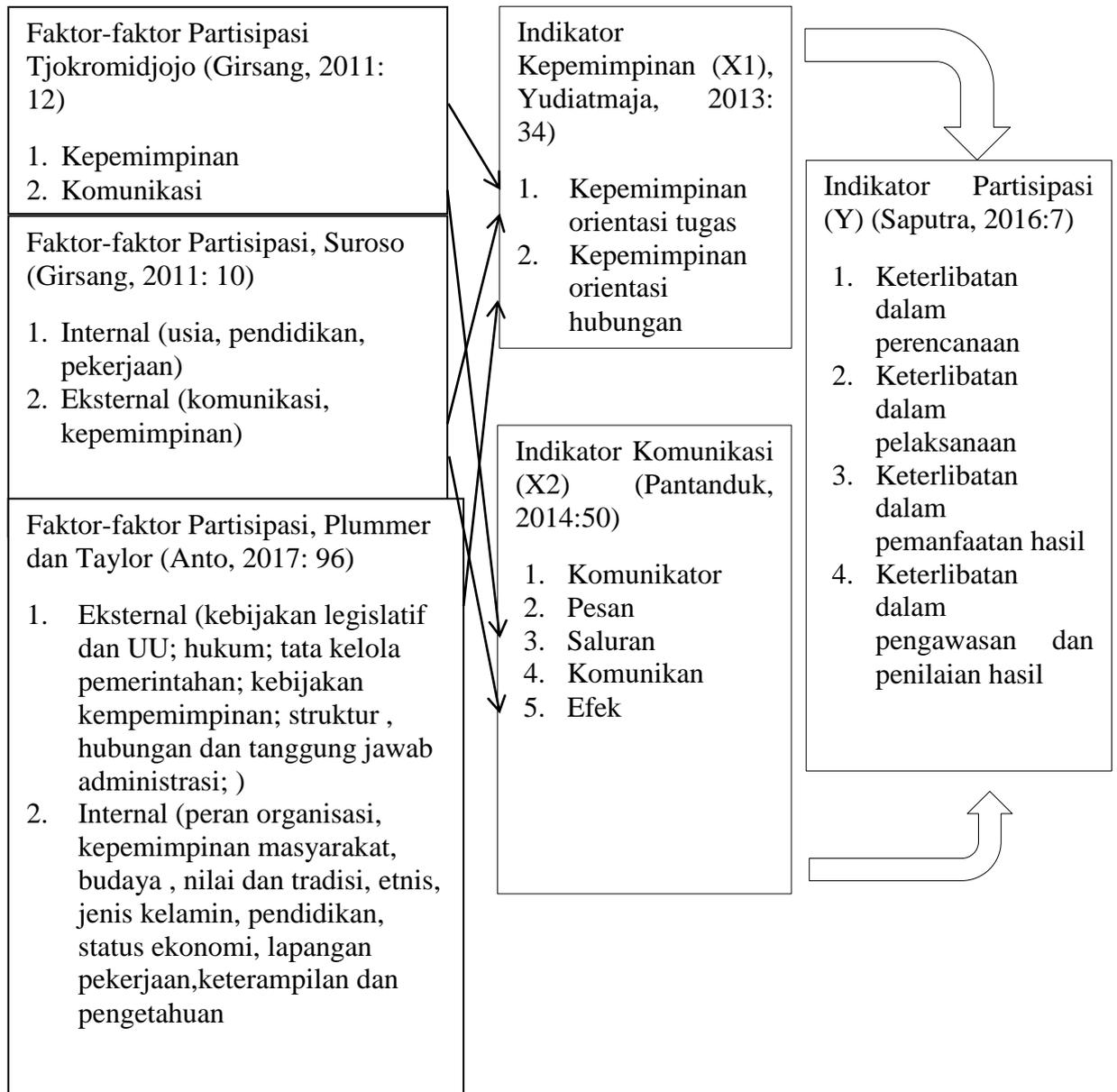
1.5.9 Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kepemimpinan dan komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang mana di dalamnya terdapat gaya dasar kepemimpinan dan situasi kematangan pengikut. Semakin baik kepemimpinan dan komunikasi maka akan sebaik pula partisipasi masyarakat. Sebaliknya, semakin buruk kepemimpinan dan komunikasi maka akan semakin buruk juga partisipasi masyarakatnya.

Contoh, ketika pemimpin sudah menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi pengikut dan komunikator yang menyampaikan pesan dengan jelas maka partisipasi masyarakat akan baik. Sebaliknya, apabila pemimpin belum menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi kematangan masyarakat dan pesan yang disampaikan komunikator tidak jelas maka partisipasi masyarakat akan rendah juga.

Berdasarkan penjelasan teori-teori sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka berfikir seperti berikut :

Gambar 1.6
Kerangka Berfikir



1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. (Sugiyono, 2011: 64) Pengertian hipotesis juga dikemukakan oleh Gay (dalam Taniredja, 2014: 24) yaitu penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku, gejala-gejala, atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Hipotesis adalah harapan-harapan yang dinyatakan oleh peneliti mengenai hubungan antara variabel-variabel di dalam masalah penelitian. Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka dapat didefinisikan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara mengenai hubungan antar variabel pada suatu penelitian yang perlu diuji kebenarannya.

Ada beberapa jenis hipotesis (Sugiyono, 2011: 67), berikut adalah jenis-jenis hipotesis tersebut :

a. Hipotesis Deskriptif

Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri.

b. Hipotesis Komparatif

Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda.

c. Hipotesis Asosiatif

Hipotesis asosiatif adalah jawaban terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang” memiliki 2 variabel bebas/*independent* (X) yaitu kepemimpinan dan komunikasi serta memiliki 1 variabel terikat/*dependent* (Y) yaitu partisipasi masyarakat.

Hipotesis pada penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif, karena rumusan masalah pada penelitian ini menanyakan pengaruh antara 3 variabel. Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka berikut hipotesis pada penelitian ini :

- a. H1 : terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
- b. H2 : terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

- c. H3 : terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersama-sama terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

1.7 Definisi Konsep

Definisi konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sebuah proses pemberian pengaruh kepada sekelompok orang sesuai dengan tugasnya agar tujuan yang telah disepakati bersama tercapai.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses pemindahan informasi dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain dan memiliki umpan balik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi tercapainya tujuan.

3. Partisipasi

Partisipasi adalah proses keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yang mempengaruhi hidup mereka. Pembangunan haruslah dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat, bukan hanya pemerintah saja, karena masyarakat sendiri yang paling mengetahui kebutuhan yang diperlukan.

1.8 Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konsep pada sub bab sebelumnya, maka berikut adalah definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1.6
Definisi Operasional

No (1)	Variabel (2)	Dimensi (3)	Indikator (4)	Keterangan (5)	No Item (6)
1.	Kepemimpinan	Kepemimpinan orientasi tugas	1. Pemimpin memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota sesuai kemampuannya	1. Pemimpin memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota sesuai kemampuannya	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. Pemimpin memberikan intruksi yang jelas kepada anggota tentang tugas yang harus dilaksanakan	2. Pemimpin memberikan intruksi jelas (apa, dimana, kapan dan bagaimana) anggota harus melaksanakan tugasnya	2
			3. Pemimpin mengawasi kegiatan anggota	3. Pemimpin mengawasi anggota ketika anggota melaksanakan tugas	3
		Kepemimpinan orientasi hubungan	1. Pemimpin dan anggota membuat keputusan secara bersama-sama	1. Pemimpin dan anggota saling berhubungan baik untuk membuat keputusan	4
			2. Pemimpin dan anggota saling bertukar pendapat atau ide	2. Pemimpin dan anggota saling bertukar pendapat dan ide	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. Pemimpin memberikan solusi dan motivasi atas permasalahan yang dialami anggota.	3. Pemimpin memberikan solusi dan motivasi atas permasalahan yang dialami anggota	6
2.	Komunikasi	Komunikator	1. Penyampaian pesan	Komunikator menyampaikan pesan dengan jelas	7
			2. Daya tanggap komunikator	Komunikator menerima umpan balik dari komunikan	8
			3. Daya empati	Komunikator tertarik dengan pesan yang disampaikan komunikator	9
		Pesan	1. Kejelasan pesan	Pesan disampaikan komunikator dengan jelas	10
			2. Situasi dan kondisi	Pesan yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan situasi	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saluran	1. Forum pertemuan	Komunikasi dilakukan dengan rapat	12
			2. Pemanfaatan media	Komunikasi melalui media seperti ponsel atau internet	13
		Komunikasikan	1. Daya respon	Komunikasikan merespon dengan baik informasi yang diberikan komunikator	14
			2. Jalinan hubungan	Komunikasikan menjalin hubungan yang baik dengan komunikator	15
		Efek	1. Keterbukaan	Komunikasi antara komunikator dan komunikasikan bersifat terbuka	16
			2. Tindak lanjut	Ada tindak lanjut setelah adanya komunikasi antara komunikasikan dengan komunikator	17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Partisipasi	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan	1. Keterlibatan dalam rapat dan musyawarah	Masyarakat terlibat dalam musyawarah	18
			2. Kesiapan memberi data dan informasi	Masyarakat bersedia memberi data dan informasi guna perencanaan pembangunan	19
			3. Keterlibatan dalam penyusunan rencana pembangunan	Masyarakat terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan	20
			4. Keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan	Masyarakat terlibat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan dalam pembangunan	21
			5. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan	Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan	1. Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Masyarakat ikut melaksanakan pembangunan	23
			2. Kesiediaan masyarakat memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan keterampilan	Masyarakat memberi sumbangan ide, keahlian atau keterampilan	24
			3. Kesiediaan masyarakat memberikan sumbangan berupan materi	Masyarakat memberi sumbangan berupa uang	25
			4. Tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan	Masyarakat ikut membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan	26
		Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil	1. Paham tentang hakikat pembangunan	Masyarakat mengerti fungsi dari pembangunan	27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. Kesiediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan	Masyarakat bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan	28
			3. Kesiediaan dalam melestarikan hasil pembangunan	Masyarakat ikut menjaga hasil pembangunan	29
			4. Kesiediaan dalam mengembangkan hasil pembangunan	Kesiediaan masyarakat dalam mengembangkan hasil pembangunan	30
		Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil	1. Adanya norma atau aturan standar	Masyarakat memiliki norma/aturan dalam kegiatan pembangunan	31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan	Masyarakat memiliki kesempatan mengawasi kegiatan pembangunan	32
			3. Keaktifan dalam melakukan pengawasan	Masyarakat ikut aktif mengawasi kegiatan pembangunan	33
			4. Dampak pendapatan	Pendapatan masyarakat naik akibat adanya pembangunan	34
			5. Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja	Munculnya lapangan kerja baru dan tingginya serapan tenaga kerja	35
			6. Dampak terhadap pengembangan sektor lain	Adanya pengembangan sektor lain	36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			7. Pemberian saran dan kritik dari masyarakat	Masyarakat ikut memberi kritik dan saran terkait kegiatan pembangunan	37

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah diartikan sebagai kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian merupakan data yang valid, di mana terdapat derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010: 2). Menurut Arikunto (2009: 216) metode penelitian adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya.

Berdasarkan kedua pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara rasional, empiris dan sistematis yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data untuk penelitian.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian “Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang” menggunakan penelitian kuantitatif. Arikunto (2009:27) menjelaskan penelitian kuantitatif sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Pengertian lain dikemukakan oleh Sugiyono yaitu, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat numerik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2011: 8). Menurut kedua pengertian maka dapat dijelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka-angka di dalam datanya dengan tujuan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.

Menurut Prasetyo dan Jannah (2012: 41), tipe penelitian kuantitatif terdiri dari 3 tipe, yaitu:

a. Eksploratori.

Penelitian eksploratori memiliki tujuan untuk mengenal atau mendapatkan pandangan baru mengenai suatu gejala, yang sering kali mampu merumuskan masalah penelitian yang lebih tepat.

b. Deskriptif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/ suatu masyarakat tertentu.

c. Eksplanatori.

Penelitian eksplanatori berusaha untuk menguji dan menjelaskan hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variable atau lebih. Penelitian eksplanatori juga bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menjelaskan suatu gejala atau fenomena yang diteliti.

Sesuai dengan tipe penelitian di atas maka tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian kuantitatif eksplanatori, karena penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan hubungan yang nantinya untuk

mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel bebas (kepemimpinan dan komunikasi) dengan variabel terikat (partisipasi).

1.9.2 Populasi dan Sampel

1.9.2.1 Populasi

Menurut Singarimbun dan Effendi (dalam Sinambela, 2014: 94), populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Pengertian populasi lainnya dikemukakan Sugiyono. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 80). Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat didefinisikan bahwa populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu sehingga ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah seluruh warga Kelurahan Gedawang yang berusia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Keseluruhan warga yang berusia produktif adalah 6222 orang.

1.9.2.2 Sampel

Menurut Malhotra (dalam Sinambela, 2014: 95), sampel adalah sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dalam suatu penelitian. Pengertian lain dikemukakan oleh Sugiyono yang menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Suatu penelitian memungkinkan memiliki populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua, maka dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut (Sugiyono, 2011: 81). Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa sampel adalah bagian yang lebih kecil dari populasi dan memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat dijadikan data penelitian.

Menentukan ukuran sampel minimal yang harus ditetapkan para peneliti banyak mengacu pada *Rumus Slovin*, yakni:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = presentasi kelonggaran ketelitian karena kesalahan penetapan sampel

Menurut Isaac dan Michael (dalam Sugiyono, 2011: 86) persen kelonggaran yang bisa digunakan antara dalam penentuan sampel adalah 1%, 5% dan 10%. Penulis memilih kelonggaran yang bisa digunakan sebesar 10% karena jumlah populasi yang ada tergolong banyak, yaitu berjumlah 6222. Berdasarkan data tersebut, berikut adalah perhitungan sampel dalam penelitian ini :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{6222}{1 + 6222 \times 0,10^2}$$

$$n = \frac{6222}{1 + 6222 \times 0,01}$$

$$n = \frac{6222}{1 + 62,22}$$

$$n = \frac{6222}{63,22}$$

n=98,41 (pembulatan menjadi 98 sampel)

Berdasarkan rumus slovin di atas, jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 98 warga Kelurahan Gedawang.

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Ada banyak pilihan terhadap teknik pengambilan sampel. Salah satunya adalah menurut Sugiyono (2011: 82) yang membagi teknik pengambilan sampel menjadi dua yaitu : *probability sampling* dan *non probability sampling*.

Probability sampling memiliki beberapa klasifikasi lagi, salah satunya adalah *simple random sampling* . *Simple random sampling* adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih (Kerlinger, 2009: 188) *Non probability sampling* juga memiliki beberapa klasifikasi lagi, salah satunya adalah *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono: 2011: 85)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih *sampling purposive* untuk menentukan sampel yang digunakan, yaitu warga RW 1, 3 dan 10. Sampel tersebut penulis pilih karena banyak peternak yang bertempat tinggal di RW 1 dan 3 sedangkan RW 10 karena berdekatan dengan Kampung Tematik Susu Perah sehingga RW 1, 3 dan 10 penulis rasa adalah wilayah yang paling merasakan dampak dari adanya pembangunan Kampung Tematik Susu Perah. Teknik

pengambilan sampel lain yang penulis gunakan adalah *sampling random* untuk menentukan warga yang akan penulis berikan kuesioner penelitian.

1.9.4 Jenis Dan Sumber Data

1.9.4.1 Jenis Data

Menurut Sinambela (2014: 114), jenis data di dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber (responden) yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka atau yang diangkakan.

Penelitian ini, menggunakan data kuantitatif karena untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan komunikasi (variabel *X*) dan partisipasi (variabel *Y*) terhadap pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

1.9.4.2 Sumber Data

Sinambela (2014: 112) menjelaskan bahwa sumber data dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Data primer terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif dapat diperoleh melalui metode survei, eksperimen, dan observasi, apabila diperoleh dengan survei dapat dilakukan secara langsung dari individu atau menggunakan media telfon, surat dan internet. Data kualitatif dapat diperoleh wawancara, fokus diskusi berkelompok.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain diolah dan dipublikasikan untuk kepentingan tertentu. Peneliti hanya meminjam data tersebut sesuai dengan kebutuhan peneliti, dalam hal ini peneliti adalah tangan kedua yang sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut ke pihak lain yang bertanggung jawab atas data tersebut.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yang diperoleh dengan metode survei, yaitu dengan membagikan kuesioner kepada seluruh responden yang sudah ditentukan. Selain itu untuk memperkuat data maka dilakukan metode observasi (pengamatan langsung) dan metode wawancara kepada kepala Kelurahan Gedawang, pegawai Kelurahan Gedawang dan ketua pengurus Kampung Tematik Susu Perah.

Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berupa data monografi di Kelurahan Gedawang.

1.9.5 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2011:131). Penelitian ini menggunakan skala pengukuran Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011:132) Dalam skala Likert unsur-unsur yang diteliti diberi skor. Untuk skor yang paling tinggi dikenakan pada jawaban yang paling menunjang dan skor terendah dikenakan pada jawaban yang paling tidak menunjang. Masing-masing definisi operasional variabel diber skor 1-4, dimana makin besar skor maka makin besar responden yang mendukung. Cara pengukurannya adalah dengan menghadapkan responden pada pertanyaan, kemudian diminta untuk memberikan jawaban dengan memilih salah satu dari kategori jawaban yang telah disediakan yaitu:

- a. Jawaban yang sangat setuju dengan pertanyaan diberi skor 4
- b. Jawaban yang setuju dengan pertanyaan diberi skor 3
- c. Jawaban yang tidak setuju dengan pertanyaan diberi skor 2
- d. Jawaban yang sangat tidak setuju dengan pertanyaan diberi skor 1

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2011: 137) dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka penulis melakukan wawancara kepada Kepala Kelurahan Gedawang, Pegawai Kelurahan Gedawang, dan Ketua Pengurus Kampung Tematik Susu Perah. Tujuan dari wawancara yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner digunakan apabila penulis sudah mengetahui dengan pasti variabel yang akan digunakan. Alasan lainnya adalah apabila responden yang ada cukup banyak dan tersebar di wilayah yang cukup luas.

Penulis membagikan kuesioner kepada masyarakat Kelurahan Gedawang untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

3. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengunjungi Kelurahan Gedawang, tepatnya di Kantor Kelurahan Gedawang dan Kampung Tematik Susu Perah dengan tujuan mengetahui keadaan dan permasalahan yang terjadi senyatanya di lapangan.

1.9.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau secara spesifik fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2011: 102) Definisi instrumen penelitian juga dikemukakan oleh Arikunto (2010: 203) yaitu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan kedua pengertian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat untuk mengukur fenomena atau variabel penelitian agar hasilnya lebih baik, cermat, lengkap, sistematis dan mudah diolah.

Penelitian “Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang” menggunakan instrumen penelitian item kuesioner tertutup dengan Skala Likert. Penggunaan kuesioner menyebabkan instrumen harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya.

1.9.7.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2011: 121) validitas instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Uji validitas biasanya digunakan dengan menghitung korelasi antara setiap skor butir instrumen dengan skor total. Kriteria penilaian uji validitas adalah :

1. Apabila r hitung $>$ r tabel, maka kuesioner tersebut valid
2. Apabila r hitung $<$ r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid

1.9.7.2 Uji Realibilitas

Realibilitas instrumen adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik analisis yang sudah dikembangkan oleh *Alpha Cronbrach*. Pada uji reliabilitas, α dinilai reliabel jika lebih besar dari r tabel, artinya bila koefisien α nya $>$ dari r tabel maka kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan. Pengujian validitas dan realibilitas dari setiap pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan alat bantu program *SPSS For Windows*.

1.9.8 Teknik Analisis

Teknik Analisis merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik dalam penelitian kuantitatif ada dua, yaitu menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, sedangkan statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistik *parametis* dan *non parametis* yang digunakan untuk menguji hipotesis. (Sugiyono, 2011: 147)

Penelitian “Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung Tematik Susu Perah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang” menggunakan teknik statistik inferensial.

1.9.8.1 Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji korelasi sendiri terdiri dari uji korelasi sederhana dan ganda. Pada penelitian ini, penulis menggunakan uji korelasi sederhana untuk menguji hubungan antara variabel bebas dengan terikat secara mandiri, sedangkan uji korelasi ganda untuk menguji hubungan antara 2 variabel bebas dengan terikat secara bersama-sama. Berikut adalah pedoman dalam memberikan interpretasi koefisien korelasi (Sugiyono, 2011: 150):

1. 0,00-0,199 : Sangat rendah
2. 0,20-0,399 : Rendah
3. 0,40-0,599 : Sedang
4. 0,60-0,799 : Kuat
5. 0,80-1,000 : Sangat kuat

1.9.8.2 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase (%) sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisa Koefisien Determinasi akan di olah menggunakan SPSS *Statistic 26*.

1.9.8.3 Uji Regresi Sederhana

Uji Regresi Sederhana adalah model regresi yang melibatkan antara 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Persamaan uji regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

keterangan :

Y : Variabel dependen

a : Konstanta persamaan regresi

b_1 : Koefisien regresi X_1

e : *Error terms*

1.9.8.4 Uji Regresi Berganda

Uji Regresi Berganda yaitu model regresi yang digunakan karena variabel bebas berjumlah 2 atau lebih dan variabel terikat berjumlah 1. Persamaan uji regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen

a : Konstanta persamaan regresi

b_1 : Koefisien regresi X_1

b_2 : Koefisien regresi X_2

e : *Error terms*

1.9.8.5 Uji T

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat secara mandiri. Pada penelitian ini berarti untuk menguji pengaruh variabel kepemimpinan dengan variabel partisipasi dan menguji pengaruh variabel komunikasi dengan variabel partisipasi. Berikut adalah kriteria pengujiannya :

1. Apabila $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel *independent* (kepemimpinan) berpengaruh terhadap variabel *dependent* (partisipasi)
2. Apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel *independent* (kepemimpinan) tidak berpengaruh terhadap variabel *dependen* (partisipasi)

Berikut adalah kriteria pengujian untuk pengaruh variabel komunikasi terhadap variabel partisipasi :

4. Apabila $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel *independent* (komunikasi) berpengaruh terhadap variabel *dependent* (partisipasi)
4. Apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel *independent* (komunikasi) tidak berpengaruh terhadap variabel *dependen* (partisipasi)

1.9.8.6 Uji F

Uji f digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (kepemimpinan dan komunikasi) secara bersama-sama terhadap variabel bebas (partisipasi masyarakat) dalam pembangunan Kampung Tematik Susu Perah, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang secara bersama-sama, berikut adalah kriteria pengujiannya:

Kriteria pengujian :

1. Apabila $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel *independent* (kepemimpinan dan komunikasi) secara bersama berpengaruh terhadap variabel *dependent* (partisipasi)
2. Apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel *independent* (kepemimpinan dan komunikasi) secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel *dependen* (partisipasi)